



RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN 2016-2020

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
NOMOR 138 TAHUN 2016

Tim Penyusun

Ernawati Sinaga
Tatang Mitra Setia
Nonon Saribanon
Tri Waluyo
Suprihatin
Harini Nurcahya

UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA
TAHUN 2016



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 178 Tahun 2016

Tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NASIONAL TAHUN 2016 - 2020

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemanfaatan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di kalangan Sivitas Akademika Universitas Nasional perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Surat Keputusan Rektor No. 185 Tahun 2012;
6. Surat Keputusan Rektor No. 186 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama tanggal 19 September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL Tentang RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NASIONAL TAHUN 2016 – 2020;
- Pertama : Mengesahkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh semua dosen di Lingkungan Universitas Nasional;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 Oktober 2016



Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur;

SAMBUTAN

Rencana Strategis (Renstra) Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016-2020 ini disusun dengan mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, serta isu-isu terkini yang terkait dengan pendidikan tinggi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Renstra ini juga disusun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Universitas Nasional serta salah satu wujud kontribusi dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional.

Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016-2020 disusun melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sivitas akademika, dan seluruh pimpinan Universitas Nasional. Renstra ini merupakan dokumen yang dipergunakan sebagai landasan penyusunan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang telah disepakati, dengan mempertimbangkan capaian Tri Dharma Universitas Nasional saat ini.

Jakarta, 26 September 2016

Rektor Universitas Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putra, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan selesainya Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016-2020.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Kopertis Wilayah III Jakarta;
3. Rektor Universitas Nasional beserta jajaran pimpinan;
4. Sivitas akademika Universitas Nasional;
5. Seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra ini.

Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak bagi perbaikan Renstra tersebut. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 1 September 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pendekatan Penyusunan Renstra	2
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Landasan Pengembangan	6
2.3 Pendekatan Program	7
2.4 Analisis SWOT untuk Penilaian Kondisi Eksisting	10
BAB III GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
3.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	13
3.2 Strategi dan Kebijakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	13
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA	16
4.1 Kebijakan Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat	16
4.2 Program Prioritas	17
4.3 Indikator Kinerja	18
BAB V POLA PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM	21
5.1 Prosedur Perencanaan dan Implementasi Program	22
5.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program	22
BAB VI PENUTUP	26

DAFTAR PUSTAKA

27

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Pelaksanaan Kegiatan PkM Berdasarkan Sumber Pendanaan	11
2	Analisis Kondisi Internal	11
3	Analisis Kondisi Eksternal	12
4	Gambaran Program PkM Prioritas	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1	Tahapan dalam Pelaksanaan Penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016 - 2020	3
2	Tahapan Program Pengembangan Masyarakat	10
3	Tahapan dalam Program PkM Berkelanjutan	15
4	Hubungan Variabel-variabel dalam Hierarki Masukan-Proses-Keluaran-Dampak-Indikator dalam Monitoring Evaluasi Program	18
5	Prosedur Penyusunan Program PkM Universitas Nasional	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan wilayah dan pengembangan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu tugas yang diemban oleh perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi terhadap lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, kebijakan dan implementasi program pengabdian kepada masyarakat perlu direncanakan dengan baik melalui kajian yang kemudian dituangkan dalam sebuah Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat selama 5 (lima) Tahun yaitu 2016-2020. Dokumen Renstra tersebut dapat dijadikan tolok ukur (*benchmark*) untuk keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat serta mendorong peningkatan kinerja program.

Penyusunan Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan suatu mekanisme optimalisasi pengelolaan sumber daya untuk membantu masyarakat dan lingkungannya dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Optimalisasi sumber daya tersebut mencakup usaha-usaha peningkatan kapasitas masyarakat dan kapasitas institusi lokal, serta pelayanan sosial kepada berbagai komunitas. Konsentrasi program berlandaskan kepada *community empowerment* yang bertitik tolak pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Tahun 2016.

Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan komitmen Universitas Nasional sebagai sebah perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan kemanusiaan. Hal tersebut merupakan kesungguhan Universitas Nasional untuk berperan dalam pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong upaya percepatan pembangunan di Indonesia.

Sejalan hal tersebut, berkembang pula pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial institusi pendidikan tinggi yang tercantum dalam *Social Responsibility* sebagaimana disebutkan pada ISO 26000. Seluruh tahapan dalam

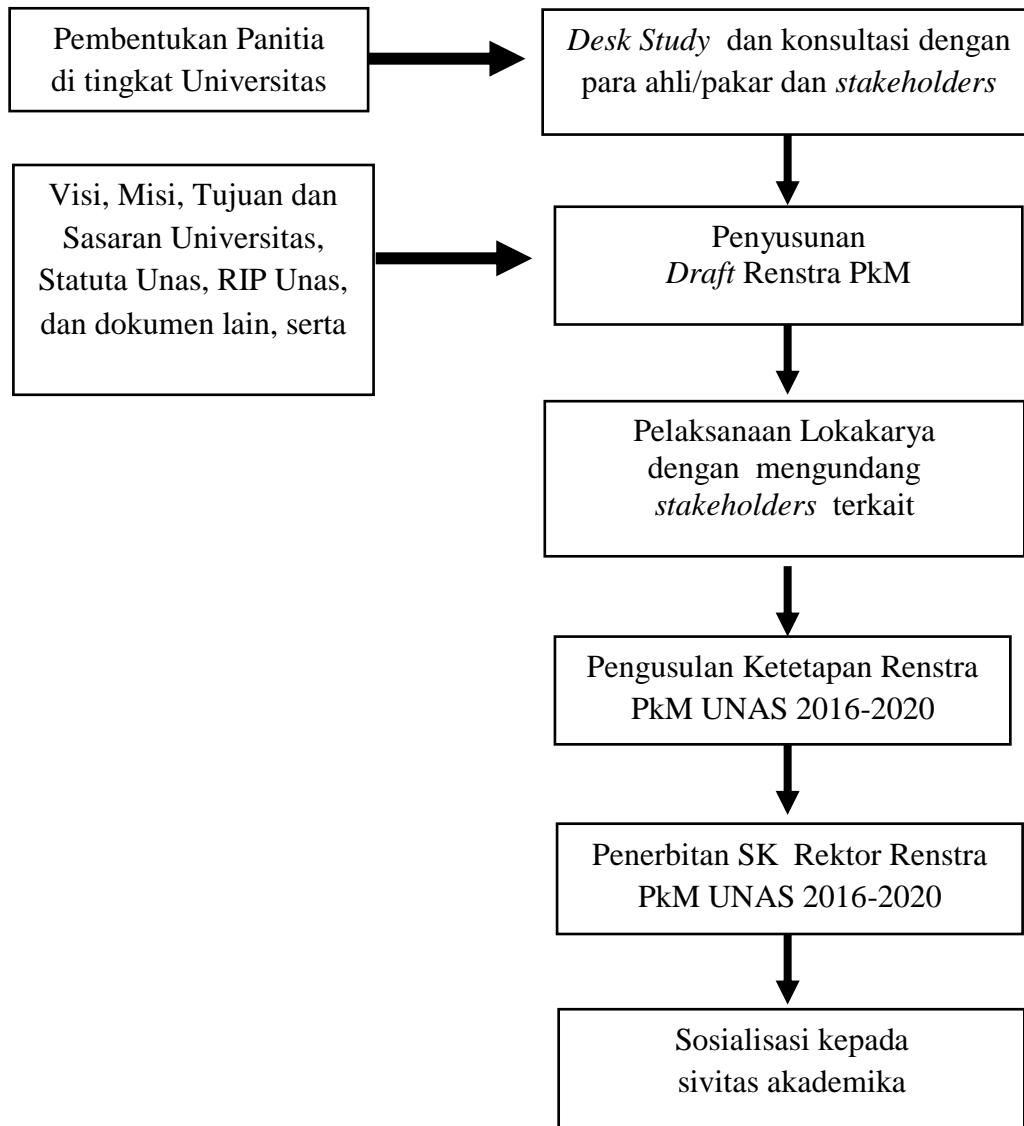
implementasi program PkM merupakan aspek penting yang saling berkait, mulai dari tahap input-proses-output-dampak, sebab keseluruhan tahapan tersebut dapat menggambarkan kinerja program PKM. Sebagai contoh, perencanaan yang baik dan terintegrasi (input) dapat menghasilkan sinergi yang optimal antar program dalam kerangka pencapaian sasaran.

Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang, merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mengawal program agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang terpenting adalah komitmen yang kuat terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, ciri atau indikator penting kinerja program PkM adalah adanya keberlanjutan program dan menguatnya kemandirian masyarakat. Selain itu, sinergi dengan seluruh *stakeholders*, termasuk pemerintah daerah, sangat penting untuk menghasilkan sinergi, sebab pada dasarnya pembangunan nasional itu merupakan tanggung jawab bersama. Masa berlaku Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional adalah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2020.

1.2. Pendekatan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional, disusun dengan memperhatikan isu-isu nasional dan global, tetapi dikaitkan dengan aspek kewilayahan dan rencana pembangunan daerah terkait. Selain itu, pelaksanaannya juga mempertimbangkan pendekatan multidisiplin sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang ada di Universitas Nasional.

Mekanisme penyusunan renstra dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak antara lain pimpinan universitas, fakultas, program studi, pusat studi/kajian, alumni, serta *stakeholders* yang kompeten dan relevan dengan program PkM. Alur mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan dalam Penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016-2020

1. Tahap pengumpulan informasi/desk study

Pengumpulan informasi dilakukan melalui media diskusi, pertemuan dan penelusuran. Tindakan pengumpulan informasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menghimpun masukan, ide, harapan, persepsi dan pandangan tentang pengabdian kepada masyarakat dari para *stakeholder* (diantaranya: pimpinan universitas, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pemerintah, pihak swasta).

2. Tahap Penyesuaian Rumusan dengan Dokumen Universitas

Tahap ini berbentuk kegiatan diskusi lanjutan dan dilakukan oleh para *key persons* yang mewakili kepentingan dari keseluruhan *stakeholders*. Diskusi ini diselenggarakan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh *key persons* sebagai peserta diskusi dan sekaligus mengikutsertakan pimpinan Universitas di dalamnya. Pimpinan Universitas pada diskusi tersebut diposisikan sebagai pihak yang berkompeten untuk memastikan bahwa renstra yang disusun sejalan dengan visi dan misi Universitas.

3. Tahap Diskusi Pendalaman oleh Tim Penyusun Renstra PkM UNAS 2016-2020

Rumusan-rumusan yang telah diperoleh sebelumnya dari tahap kedua, kemudian dibahas secara mendalam pada diskusi pendalaman atau lokakarya oleh Tim Penyusun Renstra tersebut, yang diarahkan dan disimpulkan menjadi rumusan yang lebih ringkas dan spesifik. Dalam tahap inilah, Renstra dibentuk dan disepakati.

Dalam penyusunan Renstra tersebut, juga dilakukan kajian berkaitan dengan isu-isu global dan nasional, isu-isu wilayah, dan keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Nasional. Dalam implementasinya, didorong untuk dilaksanakan antar program studi (multidisiplin), sehingga terjalin kebinekaan intelektual, di samping mengembangkan kemitraan dan jejaring dengan pihak luar. Beberapa isu nasional yang dihimpun adalah:

1. Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pengembangan UMKM
2. Konservasi Sumber Daya Alam, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kebencanaan
3. Pembangunan Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Pembangunan Wilayah Perbatasan
5. Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Visi dan Misi

Visi dan misi program PkM merupakan arah kebijakan yang mendasari seluruh perencanaan program dan capaian sampai dengan tahun 2020, serta selaras dengan visi dan misi Universitas Nasional.

VISI

Mewujudkan komitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif, spesifik, berbasis potensi lokal dan kemitraan secara berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan

Dari visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sebagai misi yang akan memandu pencapaian visi. Selaras dengan misi Universitas Nasional, maka misi Program PkM Universitas Nasional adalah:

MISI

- Menerapkan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
- Mengembangkan kepedulian sosial dan kontribusi perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
- Membangun kohesivitas sosial dan mengembangkan modal sosial dalam bingkai budaya nasional yang dapat mendukung percepatan pembangunan
- Mengembangkan potensi lokal melalui kemitraan dan pengembangan jejaring.

2.2. Landasan Pengembangan

Renstra PkM UNAS 2016-2020 disusun dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi secara umum maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan UNAS secara khusus yang antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- j. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor Tahun tentang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, tidak lepas dari konsep Pengembangan Masyarakat (*Community Development*), yang merupakan salah satu cara atau sarana untuk membangun wilayah atau masyarakat. Definisi mengenai pengembangan masyarakat sangat beragam, namun untuk mudahnya definisi yang dapat dianggap mewakili konsep tersebut adalah “upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dalam dimensi sosial, ekonomi maupun

budaya yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan”. Konsep komunitas dalam *community development* memiliki makna yang lebih luas, meliputi aspek ekologis, ekonomis dan juga sosiologis. Komunitas digambarkan sebagai unit interaksi sosial ekonomi yang lebih menunjuk kepada sistem administrasi (teritorial) yang paling bawah. Kelompok, merupakan kesatuan masyarakat yang mengidentifikasi diri berdasarkan karakteristik tertentu, seperti pekerjaan, kekerabatan, gender, etnis dan sebagainya. Untuk unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Dalam renstra ini, konsep “komunitas” yang dimaksud adalah “ikatan sosial” yang berlandaskan teritorial di mana masyarakat di kawasan tersebut hidup dalam suatu lokalitas tertentu dengan eksistensi yang jelas.

2.3. Pendekatan Program

Ruang lingkup program pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan masyarakat sangat luas dan multi dimensional, baik sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya maupun berbagai hal berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan program pengembangan masyarakat, perlu membatasi pada beberapa dimensi kehidupan sosial masyarakat, seperti; pendidikan, kesehatan, kehidupan ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik. Enam dimensi tersebut dipilih karena pengaruhnya yang determinan dalam setiap sendi kehidupan sosial masyarakat, dimana satu dengan yang lain memberikan pengaruh kuat, sehingga harus diperhitungkan sebagai faktor determinan dalam dimensi kehidupan masyarakat.

Terdapat tiga komponen pendekatan pengembangan masyarakat, yaitu: *Pertama*, penekanan pada fungsi kemandirian termasuk sumber-sumber ekonomi dan tenaga kerja setempat, serta kemampuan manajemen lokal. Kemandirian menjadi sangat penting agar independensinya tetap terjaga dan kesadaran masyarakat tidak terdominasi oleh aktor-aktor di luar wilayah dan komunitasnya. *Kedua*, penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, melalui pembentukan organisasi-organisasi lokal. Penyatuan dapat membentuk kohesi sosial yang berguna bagi pembentukan budaya gotong royong. *Ketiga*, penekanan pada perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. Aspek khusus dalam perubahan sosial pada program pembangunan masyarakat, adalah bagaimana meniadakan ketimpangan peran para anggota masyarakat baik di dalam maupun di antara komunitas-komunitas tersebut serta menuju pada perubahan sosial yang

harmonis, maju dan sejahtera. Dari ketiga pendekatan tersebut, secara teknis dan praktis pada dasarnya *community development* dapat dikembangkan melalui dua kegiatan penting, yaitu *Pemberdayaan* dan *Pendampingan Masyarakat*.

a. Pemberdayaan.

Ruang lingkup pemberdayaan dimulai dari upaya perjuangan untuk memperoleh kebebasan hingga kesempatan mengembangkan diri, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya terpenuhinya kebutuhan dasar (ekonomi), pengembangan sumber daya manusia, atau peningkatan peran kelembagaan masyarakat (desa), tetapi juga berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat untuk melepaskan diri dari *kejumud-an*, keterbelakangan dan kemandegan budaya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat menyangkut berbagai pendekatan “manusiawi” untuk mencapai sasaran kemajuan-kemajuan, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Kemudian, istilah *Pemberdayaan* itu sendiri ada sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap program pembangunan ekonomi pemerintah yang hanya menggunakan metode atas ke bawah (*top down*). Definisi pemberdayaan sendiri beragam dan bersifat kontekstual. Namun pada umumnya pemberdayaan dimaknai sebagai penguatan dan atau “mendapatkan kekuatan” (*power*), terkait dengan kemampuan masyarakat (khususnya golongan miskin dan tak berdaya) untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem sosial. Dengan akses tersebut, mereka menjadi mandiri dalam proses pengambilan keputusan sehingga mampu keluar dari kemiskinan¹. Sementara, makna lain pemberdayaan adalah sebagai segala proses yang dapat meningkatkan kontrol masyarakat atas hidup mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi (*individual*), dari persepsi sebagai obyek bergeser menjadi pelaku.

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk menjadikan komunitas mandiri, terutama dalam menyusun agenda maupun menangani urusan-urusannya sendiri. Oleh karena itu, proses ini sangat menekankan pada pentingnya *capacity building* (membangun kemampuan) dengan dukungan para *stakeholders*. Pemberdayaan kemudian menjadi pendekatan bagi pembangunan alternatif yang lebih menitikberatkan pada pendekatan *bottom-up*, dengan menempatkan rakyat yang tertinggal, sebagai prioritas, serta memberikan ruang partisipasi yang besar kepada masyarakat.

¹ Area Studies ed: *Keyword in area studies*. Harvest publisher, tahun 2000 dalam Raphaella Dewantari Dwianto, “Pendekatan Pemberdayaan dalam Pembangunan Komunitas” Paper, tahun 2002

Pedoman dalam pemberdayaan komunitas adalah pada peningkatan kemampuan komunitas dalam mengelola kehidupannya sendiri, serta meningkatnya inisiatif komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara lebih spesifik, pemberdayaan komunitas mengacu pada: *Pertama*, peningkatan kemampuan komunitas dalam bernegosiasi dengan agen-agen atau institusi di luar komunitas, menarik investasi, dan pemenuhan hak-hak komunitas. *Kedua*, peningkatan kemampuan komunitas dalam menjalankan urusan-urusan internal, atau dapat mewakili kepentingan dan pandangan warganya, dapat menangani masalah komunitas, memformulasikannya dan mengelola pembangunan komunitas.

b. Pendampingan

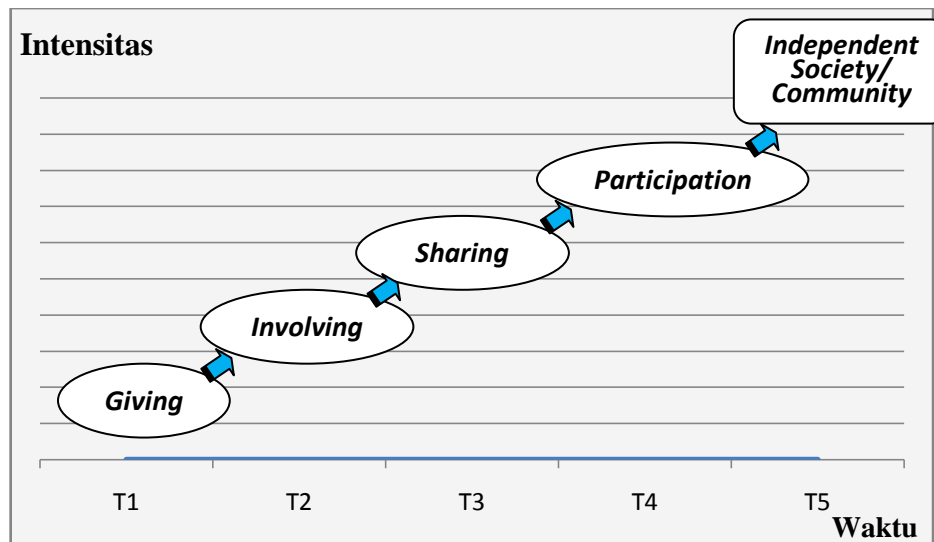
Pendampingan dilakukan melalui penempatan tenaga pendamping atau fasilitator di dalam komunitas yang memiliki peran untuk penyadaran, pengorganisasian, dan pelayanan menyeluruh. Pendampingan adalah bagian integral dari proses pengembangan (pemberdayaan) masyarakat. Seorang pendamping tidak sekedar dituntut untuk menguasai teknik tertentu dalam memfasilitasi, tetapi juga harus mampu membangun hubungan dengan *stakeholder* lain, serta mengenali konteks program secara keseluruhan. Aksi-aksi bersama *stakeholder* lainnya harus disadari oleh pemahaman yang sama tentang visi ke depan dari suatu program, dan dengan demikian mereka dapat membangun struktur hubungan yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang dikehendaki.

Pendamping (fasilitator) memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengembangan (pemberdayaan) masyarakat, dan ia juga mengemban misi kemanusiaan. Fasilitator pada hakekatnya menempatkan diri sejajar dengan pihak lain. Prinsip utamanya adalah membangun kepercayaan. Oleh karena dasarnya adalah moral, maka konteks pendampingan tidak terbatas pada substansi program dimana seseorang ditugaskan. Bahkan program itu sendiri merupakan sarana untuk berempati. Fasilitator hendaknya berempati dalam segenap kebutuhan yang melingkupi “mitra yang difasilitasi”. Dengan demikian, fasilitator adalah orang yang mampu berempati, berbagi pengalaman dan mengabdikan diri untuk suatu pekerjaan khusus berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka fasilitasi memiliki peran yang signifikan dalam proses pendampingan karena melalui fasilitasi inilah salah satu cara untuk mengubah pola hidup masyarakat desa menuju pola perilaku modern, serta memberikan pelayanan teknis, material dan intelektual untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Tindakan fasilitasi yang diberikan merupakan hasil dari proses pendampingan yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama dan kontinyu. Seorang pendamping

harus mampu mendorong partisipasi dan menangkap aspirasi masyarakat di tengah komunitas dimana ia berada.

Melalui kedua pendekatan tersebut yang dilaksanakan secara paralel, maka diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat yang dibina. Gambaran umum proses yang terjadi dalam masyarakat atau komunitas, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. Tahapan Program Pengembangan Masyarakat

Dari aspek teknologi, inovasi, dan kreativitas, juga dikembangkan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan potensi sumber daya yang ada di wilayah program. Selain itu, keunggulan riset di Universitas Nasional juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam bentuk implementasi melalui program PkM.

2.4. Analisis Situasi Saat Ini

Universitas Nasional melakukan berbagai mekanisme penyelenggaraan kegiatan PkM berupa kegiatan yang dikoordinasikan oleh LPPM antara lain berupa kegiatan rutin pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen, dan mahasiswa. Selain itu ada pula kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/PPS dan Unit Kerja lainnya, serta melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Secara garis besar, kegiatan PkM UNAS dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan PkM berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pembiayaan Kegiatan PkM	Jumlah Kegiatan PkM			Jumlah
		2013	2014	2015	
((2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembiayaan sendiri oleh dosen	-	-		N ₁ = 0
2	PT yang bersangkutan	4	4	62	N ₂ = 156
3	Kemdiknas/Kementerian lain terkait	-	5	3	N ₃ = 8
4	Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kementerian lain terkait	14	18	6	N ₄ =38
5	Institusi luar negeri	-	-	3	N ₅ =3
Total		63	68	74	205

Analisis Kondisi Internal

Faktor lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan internal dari sisi sumber daya dan kelembagaan, seperti tampak dalam tabel berikut,

Tabel 2. Analisis Kondisi Internal

Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sistem kelembagaan yang kuat di tingkat universitas, fakultas, maupun pusat-pusat studi. 2. Potensi sumber daya manusia yang besar dalam pengembangan program PkM. 3. Memiliki berbagai program studi 4. Memiliki program kerjasama dengan beberapa institusi. 5. Mempunyai pusat –pusat studi unggulan 6. UNAS mempunyai reputasi baik di tingkat nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan PkM. 2. Perlu pengembangan sumber daya manusia untuk menyelaraskan dengan kegiatan PkM yang akan dilaksanakan, khususnya pengembangan potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Perlu pengembangan tim yang kuat. 4. Masih rendahnya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin 5. Rendahnya publikasi ilmiah untuk kegiatan PkM

Secara umum, kondisi internal di atas menggambarkan bahwa Universitas Nasional memiliki potensi yang besar untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, dengan bidang program yang beragam.

Analisis Kondisi Eksternal

Dalam lingkungan eksternal ini menyangkut ancaman atau tantangan (*threats*) dan peluang (*opportunities*) yang teridentifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 3. Analisis Kondisi Eksternal

Tantangan (<i>Threats</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses informasi perlu dikembangkan, khususnya dalam mengantisipasi era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. 2. Menguatnya pengaruh globalisasi, liberalisasi, radikalisme dan politisasi. 3. Tuntutan Standar Mutu Pengelolaan Perguruan Tinggi yang transparan dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sumber dana nasional dan internasional kompetitif untuk pengembangan kegiatan PkM 2. Terdapat peluang untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pembangkit tenaga listrik dan pengembangan UMKM. 3. Pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kegiatan konservasi lingkungan berpeluang untuk masuk dalam program skala nasional dan internasional

BAB III

GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan program PkM Universitas Nasional adalah :

- Membangun kemitraan dengan seluruh *stakeholders* dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendukung proses-proses pembangunan.
- Memberikan kontribusi keilmuan dan teknologi dalam kegiatan pembangunan di wilayah binaan.
- Mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
- Mengembangkan program PkM secara efektif dan berkelanjutan.

Sasaran program PkM Universitas Nasional adalah :

- Terbangunnya kemitraan antar *stakeholders*, sehingga dapat membangun sinergi untuk mendukung proses-proses pembangunan.
- Terbentuknya reputasi dan citra yang baik bagi universitas melalui berbagai program PkM yang efektif dan berkelanjutan, sebagai wujud kontribusi terhadap perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan sekitar.
- Terwujudnya kemandirian masyarakat, baik secara sosial-budaya maupun ekonomi, melalui pengembangan potensi lokal dan kemitraan dengan berbagai pihak.

3.2. Strategi dan Kebijakan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan analisis isu lingkungan internal dan eksternal, maka disusun strategi kombinasi sebagai berikut :

Strategi *Strengths-Threats*(Strategi ST):

1. Mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat secara bersama-sama, melalui pengembangan kelembagaan masyarakat, termasuk kelompok swadaya masyarakat dan koperasi.

2. Melakukan sosialisasi ke berbagai pihak atas keberadaan dan program-program PkM universitas, sehingga didapatkan umpan balik dari para *stakeholder*
3. Mendorong terbentuknya jejaring dan kemitraan sebagai wadah komunikasi berbagai pihak terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan pembangunan.
4. Mengembangkan program sosial ekonomi yang berbasis sumber daya lokal.

Strategi Strengths-Opportunities(Strategi SO):

Berdasarkan analisis di atas strategi yang dapat dikembangkan adalah:

1. Pengembangan program berdasarkan hasil riset unggulan universitas dan kepakaran SDM yang ada di universitas.
2. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pelestariannya.
3. Pengembangan *home industry*, seperti pengolahan makanan dan kerajinan tangan, serta produk unggulan daerah binaan.

Strategi Weaknesses-Opportunities(Strategi WO):

1. Pengembangan energi alternatif seperti penggunaan lampu bertenaga matahari, pengembangan energi listrik dari matahari (*solar cell*), angin ataupun dari sampah (*waste to energy*), untuk memasok kebutuhan listrik yang semakin meningkat.
2. Pemberian pelatihan-pelatihan dalam berbagai bidang dan keterampilan, sebagai bagian dari *capacity building*.
3. Bantuan peralatan produksi dengan teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh universitas.
4. Pendampingan pembentukan koperasi untuk mengatasi masalah permodalan dan penetrasi pasar.

Strategi Weaknesses-Threats (Strategi WT):

1. Memberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan atau dengan teknologi yang berkembang.
2. Optimalisasi upaya pengembangan produk pertanian .
3. Meningkatkan kapasitas pengelola (SDM) program PkM, disesuaikan kebutuhan program.

4. Meningkatkan koordinasi dengan institusi pemerintah, terkait dengan program yang akan dilaksanakan.

Dari uraian di atas, tampak bahwa untuk mengembangkan program secara berkelanjutan, maka diperlukan strategi yang fokus, sehingga potensi sumber daya dapat optimal diarahkan dalam mengembangkan program prioritas. Selanjutnya adalah kajian atau *assessment* yang terjadwal, yang sekaligus juga sebagai sarana untuk mengembangkan tolok ukur (*benchmark*) dan ukuran (*measure*) yang selalu diperbaharui. Dari hasil kajian/*assessment* tersebut kemudian dibuat perencanaan dan implementasi program yang secara bertahap menjadi bagian dari kontinuitas peningkatan dan pengembangan program tersebut dan program-program lainnya yang terkait. Keseluruhan proses tersebut tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 3. Tahapan dalam Program PkM Berkelanjutan

Dari gambaran terdahulu, disadari bahwa dalam mengembangkan program PkM, perlu dipilih beberapa bidang program yang strategis tetapi fokus, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam seluruh aspeknya. Untuk itu, perlu dikembangkan program prioritas yang akan menjadi program unggulan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terukur kinerjanya.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

4.1. Kebijakan Umum Program Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum, kebijakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Nasional, memperhatikan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra PkM dari Kementerian Ristekdikti RI, yaitu:

1. Berbasis kewilayahan
2. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat
3. Sinergi, multi disiplin, dan bermitra
4. Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur
5. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna

Dalam implementasinya, program PkM dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- Sebagai program komplementer dari program pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
- Bersifat partisipatif (pelibatan unsur masyarakat) dalam setiap tahapan implementasi program.
- Merupakan proses pemberdayaan
- Mengutamakan penguatan kelembagaan
- Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Partnership* dan *networking* (kemitraan dan jejaring dengan berbagai pihak).
- *Local spesific* dan melalui pendekatan sosial budaya setempat.
- Berfungsi sebagai stimulan dan generator (penggerak) awal dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan Program PkM tersebut tertuang dalam bentuk Panduan Pelaksanaan Program PkM Universitas Nasional, yang diberlakukan melalui SK Rektor yang implementasinya dapat dilaksanakan melalui aturan dan SOP yang ditetapkan sebagai juklak dari panduan tersebut.

4.2. Program Prioritas

Kebijakan umum program PkM adalah pengalokasian program yang bersifat sporadis semakin lama akan semakin berkurang, baik intensitas maupun alokasi anggarannya. Sementara itu, hal tersebut berbanding terbalik dengan program yang bersifat *empowering* dan berkelanjutan, dimana semakin lama maka alokasi programnya semakin besar, karena esensi dari pengembangan masyarakat adalah mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program yang bersifat *empowering* tersebut.

Secara garis besar, beberapa fokus program PkM perlu dipertimbangkan untuk segera dipersiapkan pelaksanaannya antara lain adalah:

1. Konservasi berbasis masyarakat untuk keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
2. Pengelolaan lingkungan perkotaan dan pengolahan sampah berbasis masyarakat
3. Pengembangan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat
4. Peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan
5. Pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat
6. Pengembangan aspek sosial budaya dalam mendukung pembangunan sosial.

Dari berbagai pertimbangan di atas, kemudian disusun strategi implementasi program berdasarkan waktu, yaitu:

Tahun pertama penekanannya lebih pada perencanaan yang berbasis kajian (link & match dengan hasil-hasil penelitian), penyusunan SOP, dan program yang memiliki urgensi tinggi, khususnya di wilayah binaan atau isu yang strategis.

Tahun kedua, pengembangan program pendampingan/fasilitasi dalam setiap implementasi program untuk menjamin keberhasilan dan pencapaian sasaran program.

Tahun ketiga, Pengembangan jejaring dan kemitraan dengan melibatkan *stakeholders* dan optimasi partisipasi masyarakat dalam implementasi program.

Tahun keempat dan kelima, upaya tersebut dapat mengarahkan pada pemilihan program yang lebih fokus dan menjadi unggulan.

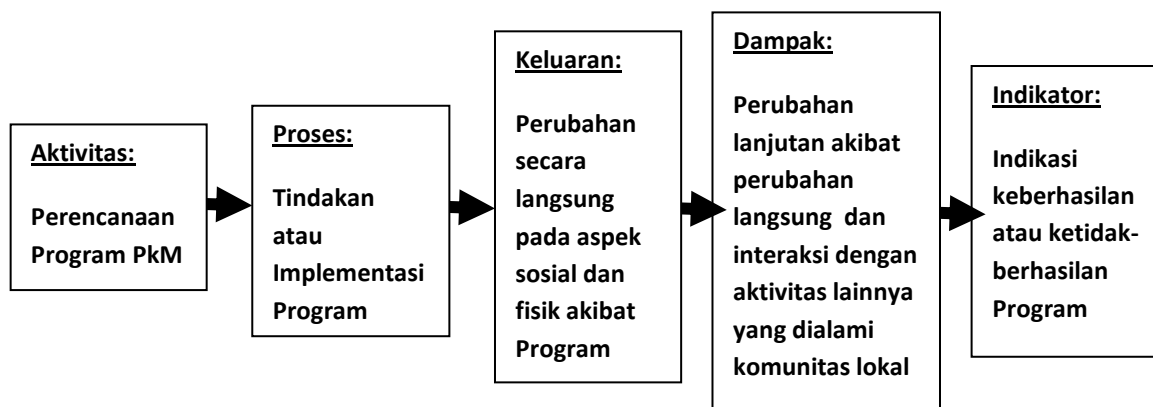
Secara garis besar, target pencapaian dalam jangka pendek dan menengah dari program PkM adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Gambaran Program PkM Prioritas

Tahun	Sasaran	Bentuk Program
2016	Penetapan Renstra dan program prioritas	Identifikasi, klasifikasi, dan rincian program PkM, persiapan SDM & SOP internal
2017	Pengembangan program berkelanjutan	Pendampingan/fasilitasi Program
2018	Pengembangan kemitraan dan Jejaring	Pembentukan forum <i>stakeholders</i> untuk pengembangan wilayah
2019	Peningkatan fokus dan kualitas program PkM	Penetapan dan Pengembangan Program yang berpotensi untuk menjadi Program Unggulan
2020	Peletakan dasar untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Pengembangan indikator kinerja dan model pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan renstra 5 tahun berikutnya

4.3. Indikator Kinerja

Penyelenggaraan program PkM perlu dilandasi dengan indikator keberhasilan program, yang dioperasionalkan dalam indikator *input*, *proses*, *output* dan *dampak*. Untuk mengevaluasi program PkM, diperlukan beberapa indikator untuk menilai setiap tahapan dari program. Untuk itu, dapat dipergunakan model dari Hippopoc sebagai berikut,



Gambar 4. Hubungan Variabel-variabel dalam Hirarki Masukan-Proses-Keluaran-Dampak-Indikator dalam Monitoring Evaluasi Program

a. Indikator Aktivitas (input)

- Adanya perencanaan program yang dilakukan secara partisipatif
- Adanya struktur organisasi yang memadai untuk melaksanakan program
- Adanya kajian-kajian yang mampu mendukung efektivitas program

b. Indikator Proses

- Se jauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi program.
- Se jauh mana konflik-konflik kepentingan dapat terakomodasi dalam program dan terselesaikan.
- Bagaimana adanya *transfer of knowledge* dan *skill* dapat dilakukan.
- Bagaimana menarik pihak ketiga untuk berpartisipasi.

c. Indikator Keluaran (Output)

- Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, ditemukannya alternatif kegiatan ekonomi jangka panjang.
- Kewirausahaan meningkat melalui kemampuan membaca peluang bisnis, memanfaatkan keterbatasan menjadi keunggulan, keberanian mengambil risiko, dan sebagainya.
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan dan kualitas lingkungan serta kemampuan mengakses berbagai pelayanan terkait dengan hal tersebut bagi perbaikan kualitas kehidupan mereka.
- Adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) seperti akses informasi pasar, standar produk (kuantitas dan kualitas), jaringan, manajemen keuangan, pengelolaan usaha.
- Adanya manajemen yang baik dalam kelembagaan masyarakat.

d. Indikator Dampak

- Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah.
- Lingkungan (baik internal dan eksternal) menjadi sehat dan terkelola secara baik.
- Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik sosial maupun ekonomi sehingga kemandirian masyarakat dapat terwujud baik bidang politik, ekonomi dan budaya.

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN DISEMINASI

5.1. Prosedur Perencanaan dan Implementasi Program

Implementasi program perlu merujuk pada *Roadmap* PkM UNAS, meskipun secara spesifik dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi. Prosedur penyusunan program secara umum dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 5. Prosedur Penyusunan Program PkM Universitas Nasional

Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, pedoman ini didukung oleh panduan-panduan teknis/berkas-berkas yang terkait, sebagai berikut :

1. Panduan Teknis

2. Standar Prosedur Mutu
3. *Standard Operating Procedure* (SOP)
4. Formulir/berkas: Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Hasil PKM sebagai Pertanggungjawaban Kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, keseluruhan prosedur tersebut tertuang dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang terdiri atas:

1. SOP Desk Evaluasi Proposal,
2. SOP Rekrutmen Penilai Internal,
3. SOP Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat,
4. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
5. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
6. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal

Sistem pendanaan PkM Universitas Nasional didasarkan kepada klasifikasi program PkM meliputi:

- a. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Nasional

Saat ini ada kegiatan stimulus PKM oleh dosen dengan sumber dana yang berasal dari anggaran Universitas Nasional.

- b. Pengabdian kepada masyarakat di luar Universitas Nasional

PKM di luar Institusi menyesuaikan aturan pemberi dana, baik masalah jenis maupun sistem pengelolaannya.

- c. PKM Mandiri, Kegiatan PKM Mandiri adalah kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik atas dasar permintaan masyarakat dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari luar anggaran Universitas.

5.2. Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi Program

Pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi diperlukan untuk menjamin agar berbagai program PkM yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan terukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini secara umum pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi program PkM ini mempunyai tujuan ganda, yakni:

- a) sebagai alat manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan; dan
- b) sebagai proses dokumentasi dan pembelajaran bagi berbagai pihak untuk merancang program berikutnya yang sejenis ataupun pengembangannya.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan di internal universitas, sasarannya adalah pada kebijakan dan implementasi program di lapangan. *Monitoring* dan evaluasi yang dilakukan di eksternal universitas, melibatkan pihak-pihak lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program PkM. *Monitoring* dan evaluasi eksternal ini lebih didasarkan pada *monitoring* komunitas, dampak yang dirasakan sasaran dan efektivitas *partnership* antar *stakeholders* terkait.

Syarat *Monitoring* dan evaluasi antara lain adanya kesepakatan tujuan dan kegunaan *Monitoring* dan evaluasi serta hasilnya, adanya dokumen perencanaan program dan adanya kerangka sistem dan metode *monitoring* dan evaluasi. Aktivitas *Monitoring* dan evaluasi antara lain adalah:

- Mencatat perkembangan program.
- Memantau proses dan kemajuan program secara terus-menerus.
- Mengidentifikasi masalah dan persiapan yang muncul.
- Merumuskan pemecahan masalah.
- Membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu pendek.
- Mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

Pada pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dalam program PkM terdapat tiga jenis *monitoring* dan evaluasi, yaitu:

1. ***Preliminary monitoring & evaluation***, dilakukan sebelum pelaksanaan suatu program PkM. Evaluasi ini dilakukan pada tahapan perencanaan yang bertujuan untuk melihat konsep, tujuan dan kecamatanin program yang akan dilaksanakan. Hal ini berguna agar program yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran dan merupakan suatu program yang efektif dan efisien.
2. ***Concurrent monitoring & evaluation***, dilakukan pada saat program sudah berjalan. Evaluasi pada tahapan ini merupakan wujud nyata dari proses *monitoring* yang dilakukan pada tahapan implementasi.
3. ***Feedback monitoring & evaluation***, dilakukan pada saat program sudah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan namanya, evaluasi ini adalah untuk menilai program dibandingkan dengan perencanaannya dan memberikan masukan untuk siklus berikutnya.

Indikator keberhasilan program PkM dibuat berdasar bentuk programnya. Secara umum didasarkan atas 3 (tiga) prinsip dalam implementasi program PkM, yaitu:

1. Keberlanjutan

Setiap program yang dikembangkan harus mengacu pada aspek *sustainability* (**keberlanjutan**), baik yang berbentuk *philantropy* berupa bantuan-bantuan pembangunan fasilitas umum, sosial, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Ruang lingkup keberlanjutan ini meliputi:

- **Keberlanjutan di bidang Sumber daya Manusia (SDM)**, menyangkut adanya peningkatan kualitas individu baik dari sisi pendidikan maupun kesehatannya.
- **Keberlanjutan di bidang sosial dan kelembagaan**, kesiapan dan kemandirian institusi lokal beserta modal sosial yang ada dalam mengelola program serta menyelesaikan masalahnya sendiri.
- **Keberlanjutan di bidang lingkungan hidup**, adanya kesempatan yang sama (lebih baik) untuk menikmati kondisi lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
- **Keberlanjutan di bidang ekonomi**, Penggunaan modal/sumber daya secara efisien dan menjamin produktivitas investasi dan pertumbuhan yang wajar dari seluruh sektor di masa berikutnya.

2. Dampak

Program yang dirancang dan dijalankan harus dapat **memberikan manfaat dan dampak yang nyata** baik masyarakat maupun universitas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, syarat pertama berupa keberlanjutan merupakan syarat penting bagi setiap program untuk bisa menghasilkan dampak/*impact*. Tanpa ada keberlanjutan dari program, maka tidak akan mungkin terjadi *impact* yang dapat dirasakan oleh semua *stakeholders*.

3. Jangkauan

Program PkM harus memiliki kejelasan siapa penerima manfaat dari program serta memberikan daya jangkau yang relatif memadai. Oleh karena itu, skala prioritas pelaksanaan program menjadi penting, di samping jangkauan program.

Ketiga unsur tersebut harus didukung adanya *institutional innovation* (inovasi kelembagaan). Kelembagaan disini diartikan sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang mempengaruhi perilaku individu dalam berinteraksi. Kelembagaan yang baik akan memberikan kepastian proses interaksi sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja dan efisiensi pelaksanaan program.

BAB VI PENUTUP

Perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diharuskan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 melalui pelaksanaan Tridharma. Universitas Nasional (UNAS) sebagai salah satu universitas tertua di Indonesia harus mampu memerankan fungsi pendidikan tinggi yang diamanahkan dalam peraturan perundangan dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan terkini. Berkaitan dengan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai suatu kewajiban bagi perguruan tinggi, maka pelaksanaannya memerlukan perencanaan dan strategi yang memadai, sehingga hasilnya dapat optimal. Oleh sebab itu, kemudian dirumuskan suatu strategi dan perencanaan program yang komprehensif dan terarah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016-2020 . Melalui program yang terarah dan berkelanjutan, maka kontribusi perguruan tinggi, khususnya Universitas Nasional, dapat terukur dan bermakna dalam pembangunan nasional.

Pada kesempatan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, Rektor Universitas Nasional, Pimpinan Fakultas dan Akademi di Universitas Nasional, dan seluruh sivitas akademika, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional Tahun 2016-2020.

Jakarta, 26 September 2016

TIM PENYUSUN:

Pengarah	: Wakil Rektor Bidang PPMK Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS, Apt.
Tim Penyusun	: Nonon Saribanon Tatang Mitra Setia Suprihatin Harini Nurcahya

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. 2005. *Participatory Learning and Action Reflection: Future Directions*. Brighton-UK: IDS-University of Sussex.
- Dasgupta, P. & I. Serageldin. 2000. *Social Capital : A Multifaceted Perspective*. Washington D. C. : The World Bank.
- Dwianto, RD. 2002. "Pendekatan Pemberdayaan dalam Pembangunan Komunitas" *Paper*.
- Harris, R.P., C.J. Bridger, C.E. Sachs, and S.E. Tallichet. 1995. Empowering rural sociology : exploring and linking alternative paradigms in theory and methodology. *Rural Sociology*. 60 (4) : 585-606.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Redfield, R. 1963. *Pheasant Society and Culture*. The University Chicago Press, Chicago, Illinois.
- Sajogyo, 1997. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Pertanian dan Peternakan. *Mimbar Sosek. Journal of Agricultural and Resources Socio-Economics*. Vol.10 No.2. Departemen ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian-IPB.
- Uphoff, Norman T. And Milton J. Esman. 1974. *Local Organization for Rural Development: Analysis of Asian Experience*. Special Series on Rural Local Government. Ithaca: Cornell University.
- Wasserman and Faust, 1994. *Social Networks Analysis. Methods and Applications*. United Kingdom: Cambridge University Press.